

Implementasi PERMENDES PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan

Oleh :

Safira Yuliana Putri

Dosen Pembimbing :

Isna Fitria Agustina, M.Si

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025

PENDAHULUAN

□ LATAR BELAKANG

Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga pemahaman mendalam tentang desa penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperjelas oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yang juga dilakukan oleh Desa Randegan.

Diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini Desa Randegan tercatat memiliki status Desa Mandiri, meskipun demikian, peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah indikator yang menghambat kemajuan desa tersebut.

Penelitian ini akan menilai bagaimana standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, serta disposisi pelaksana memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan IDM.

Persentase Komponen IDM Desa Randegan Tahun 2024

| No. | Komponen | Jumlah (dalam %) |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 1. | Indeks Ketahanan Sosial | 32,89% |
| 2. | Indeks Ketahanan Ekonomi | 31,99% |
| 3. | Indeks Ketahanan Lingkungan | 35,12% |

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2024

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Kajian ini akan menilai bagaimana standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, serta disposisi pelaksana memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan IDM dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.



PENELITIAN TERDAHULU

- Penelitian yang dilakukan oleh Septiawan, A., & Sintaningrum. (2018). Yang berjudul “Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna.”
- Penelitian yang dilakukan oleh Arsjad, M. F., Syukran, M., Tabo, S., Biongan, A., & Nuna, M. S. (2024). Yang berjudul “Implementasi PERMENDES PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.”
- Penelitian yang dilakukan oleh Aulia, N., Madani, M., & Tahir, N. (2023). Yang berjudul “Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Biringlala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.”



METODE

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Jenis Penelitian | → | Deskriptif Kualitatif |
| Teknik Penentuan Informan | → | Teknik Purposive Sampling |
| Informan | → | Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Warga yang aktif dalam kegiatan Pembangunan Desa. |
| Teknik Pengumpulan Data | → | Wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen terkait |
| Teknik Analisis Data | → | Pendekatan model tematik (Miles dan Huberman, 2013) : <ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan data2. Reduksi data3. Penyajian data4. Verifikasi data5. Penarikan kesimpulan |



METODE

Teori Penelitian



Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan untuk menganalisis keberhasilan Implementasi IDM di Desa Randegan, dengan 6 indikator, yaitu : **1.) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2.) Sumber Daya, 3.) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4.) Komunikasi Antar Organisasi, 5.) Sikap Pelaksana, serta 6.) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.**

Lokasi Penelitian



Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo



Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, temuan penelitian dikategorikan berdasarkan enam variabel teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu 1.) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2.) Sumber Daya, 3.) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4.) Komunikasi Antar Organisasi, 5.) Sikap Pelaksana, serta 6.) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum sepenuhnya merasakan manfaat kebijakan IDM secara merata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan IDM, keterbatasan data yang akurat untuk pengukuran indikator, serta masih adanya hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder. Secara keseluruhan, meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan IDM sesuai dengan standar yang ditetapkan, tantangan terkait distribusi manfaat dan komunikasi antar-stakeholder masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak penyuluhan dan sosialisasi untuk memastikan bahwa seluruh warga desa memahami dan dapat merasakan manfaat dari program IDM secara merata.

Hasil

2. Sumber Daya

Dalam Implementasinya, Pemerintah desa mengklaim bahwa aparatur desa telah mendapatkan pelatihan yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan IDM, terutama melalui bimbingan teknis (BIMTEK) yang diadakan setiap tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa Struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan ini telah diatur dengan baik. Namun, meskipun aparat desa telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai, masih terdapat tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memahami dan mendukung kebijakan IDM masih tergolong rendah. Sedangkan dilihat dari aspek finansial, Pemerintah Desa Randegan telah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung berbagai program yang berbasis pada indikator IDM, adapun kendala pada pemanfaatan dana desa ini adalah sulitnya mengatur prioritas alokasi dana. Selain itu, pada indikator infrastuktur, Desa Randegan sendiri sudah telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak memperoleh status desa mandiri. Salah satu indikator keberhasilan yang terlihat adalah perbaikan infrastruktur jalan, yang berkontribusi pada peningkatan mobilitas masyarakat dan akses terhadap fasilitas umum.



Hasil

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Randegan telah memiliki organisasi pelaksana yang cukup terstruktur, Dalam menjalankan kebijakan IDM, Pemerintah Desa Randegan telah memiliki prosedur yang cukup jelas, yang mencakup pengumpulan data, penginputan ke dalam sistem, serta evaluasi hasil untuk menentukan langkah tindak lanjut. Namun indikator masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar implementasi IDM berjalan lebih optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam menyinkronkan data yang diperoleh dari masyarakat dengan standar yang ditetapkan oleh IDM. Selain itu, keterbatasan komunikasi antara pemerintah desa dan dinas terkait menyebabkan adanya keterlambatan dalam pelaporan dan evaluasi program serta Beberapa data yang diperoleh dari masyarakat sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala, sehingga berpotensi memengaruhi hasil pengukuran IDM.



Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Desa Randegan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, didukung oleh kapasitas aparatur desa yang memadai serta koordinasi dengan pendamping desa. Namun, masih terdapat tantangan dalam validitas data serta partisipasi masyarakat yang belum optimal, yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan dalam mendorong pembangunan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi IDM tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan mekanisme pelaksanaan, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat serta adaptasi teknologi dalam pengelolaan data dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji strategi peningkatan kesadaran masyarakat serta pemanfaatan sistem digital dalam mendukung transparansi dan efisiensi implementasi kebijakan pembangunan desa.



TERIMAKASIH

